

Sidang Vonis Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Digelar 11 Januari 2022

JAKARTA (IM) - Nia Ramadhani serta suaminya Ardi Bakrie sudah menyampaikan pembelaan di sidang kasus narkoba. Selanjutnya, keduanya akan menjalani sidang putusan pada 11 Januari 2022.

“Setelah majelis hakim bermusyawarah, perkara Saudara akan diputus pada Selasa, tanggal 11 Januari 2022,” kata hakim ketua Muhammad Damis di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (30/12).

Dalam pleidoinya, pengacara Nia Ramadhani meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 6 bulan rehabilitasi. Nia Ramadhani dkk dinilai sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika.

“Menempatkan Terdakwa Zen Vivanto, Terdakwa Ramadhania Ardiansyah Bakrie, Terdakwa Anindra Ardiansyah Bakrie pada rehabilitasi FAN Campus di Cisarua, Bogor, untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan lamanya, dikurangi masa rehabilitasi yang sudah dijalani para Terdakwa pada

tanggal 10 Juli 2021,” ucap Wa Ode saat menyampaikan pembelaan.

Dalam hal ini, jaksa pun menyampaikan tanggapan atas pleidoi Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Jaksa menyatakan tetap pada tuntutan, yakni meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 12 bulan rehabilitasi.

“Kami masih tetap pada tuntutan kami yang telah kami bacakan sebelumnya dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan masa rehabilitasi yang telah dijalani oleh para Terdakwa,” tutur jaksa dalam sidang.

Sebelumnya, Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakrie dituntut jaksa menjalani rehabilitasi selama 12 bulan. Selain Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, sopirnya, Zen Vivanto, dituntut hukuman yang sama dengan Nia dan Ardi.

Nia Ramadhani dkk diyakini jaksa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ● han

PAN Belum Masuk Kabinet Indonesia Maju, Sekjen: Kedaulatan di Tangan Presiden

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan, pihaknya menyerahkan keputusan soal perombakan kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan Eddy menanggapi belum masuknya PAN ke Kabinet Indonesia Maju meski PAN telah menyatakan mendukung pemerintah sejak Agustus 2021 lalu.

“Kita sudah bergabung dengan pemerintah, ya tentu hal ini kembali lagi, seluruh permasalahan reshuffle kabinet adalah kewenangan Presiden, kedaulatan ada di tangan Presiden. Pak Presiden mengetahui apa yang menjadi kebutuhan beliau,” kata Eddy di Kantor DPP PAN, Jakarta, Kamis (30/12).

Eddy pun menegaskan, pihaknya tidak mengincar kursi menteri maupun wakil menteri tertentu saat memutuskan mendukung pemerintah. “Tidak ada maunya PAN, PAN ini bergabung ke pemerintah karena tantangan besar yang dihadapi pemerintahan menghadapi berbagai dimensi yang timbul karena Covid-19,” kata Eddy.

Ketua DPP PAN Saleh Dauly menambahkan, hingga kini pihaknya belum melakukan rapat untuk membahas siapa kader PAN yang akan diajukan menjadi menteri di kabinet. Menurutnya, hal itu baru akan dibahas apabila sudah ada tawaran dari Jokowi bahwa PAN akan masuk kabinet. “Kalau sudah ditawarkan pasti Ketua Umum ajak lagi kita bicara, pengurus DPP, pengurus harian semua akan diajak bicara untuk menentukan, oh kita ditawarkan posisi ini, siapa yang paling pas, apakah kita sanggup,” kata Saleh.

Ia pun mengaku tidak tahu apakah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pernah membicarakan soal menteri dengan Presiden Jokowi. “Apakah ketua umum kami sudah pernah bicara dengan Presiden, tentu pernah bicara, tapi apa yang dibicarakan kita tidak tahu karena pembicaraan itu berdua,” ujar Saleh.

Seperti diketahui, PAN bergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintah berdasarkan Rapat Kerja Nasional II PAN pada Agustus 2021 lalu. Seiring bergabungnya PAN ke koalisi pendukung pemerintah, isu reshuffle kabinet telah beberapa kali berembus tetapi belum menjadi kenyataan hingga penghujung 2021 ini. ● han

Keluarga Berharap Pelaku Pembunuhan Ibu dan Anak di Subang Segera Ditangkap

SUBANG (IM) - Ditreskrim Polda Jawa Barat (Jabar) telah merilis sketsa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pihak keluarga berharap polisi segera dapat menangkap pelaku, apalagi kasus pembunuhan ini sudah berjalan empat bulan lebih.

Diketahui, hingga saat ini polisi kesulitan mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021. Yosef dan Yoris yang kini sudah berdamai terlihat menyimak rilis sketsa terduga pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia.

Melalui Kepala Desa Jalancagak Indra Zainal Alim,

yang juga keluarga Yosef dan Yoris, dengan dirilisnya terduga pelaku pembunuhan, menjadi kabar baik bagi keluarga karena pelaku sudah diketahui polisi. Namun keluarga tidak mengenal sketsa yang dirilis polisi karena terlihat dari belakang.

“Rilis sketsa pelaku pembunuhan disambut baik oleh keluarga korban,” ujar Indra Zainal Alim, Rabu (29/12).

Keluarga berharap, polisi dapat segera mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia yang kedua jasadnya disimpan di bagasi mobil Alphard di jalanan rumah korban.

● lus



CAPAIAN VAKSINASI COVID-19 NASIONAL
Seorang siswa disuntik vaksin COVID-19 saat vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di SD Negeri 11 Langkai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (30/12). Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 29 Desember 2021 pukul 12.00 WIB, sebanyak 158,9 juta masyarakat atau 76,32 persen telah mengikuti vaksin tahap pertama dan 112,2 juta orang atau 53,91 persen sudah mendapat vaksin dosis kedua dari target 208 juta orang untuk sasaran vaksin nasional.

2 Polhukam

FOTO/ANT



CAPAIAN BEA CUKAI MADIUN 2021

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penuluhan Bea Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madiun Sri Hananto Bawono (kiri) memperlihatkan sebagian barang bukti hasil penindakan saat merilis capaian kinerja pengawasan dan pelayanan 2021 di Kantor KPPBC Madiun, Jawa Timur, Kamis (30/12). KPPBC Madiun melakukan penindakan terhadap satu juta batang rokok ilegal dan 155 ribu mili liter minuman mengandung alkohol dengan taksiran nilai barang sebesar Rp1,7 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp582,5 juta serta capaian penerimaan Rp638,876 miliar selama 2021.

Menpan RB Tegaskan ASN Tidak Wajib Ikut Pelatihan Komponen Cadangan

Komponen cadangan hanya bisa dikerahkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Komponen cadangan memiliki masa aktif dan masa tidak aktif selama masa pengabdian.

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan, surat

edaran Nomor 27 Tahun 2021 tidak mewajibkan aparat sipil negara (ASN) mengikuti pelatihan komponen cadangan. Sesuai ketentuan yang dia-

tur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, komponen cadangan bersifat sukarela.

“Dalam SE Nomor 27/2021 tersebut tidak disebutkan bahwa ASN wajib mengikuti pelatihan komponen cadangan. Program pelatihan komponen cadangan bersifat sukarela, sehingga tidak ada yang menyebutkan bahwa ASN wajib mengikuti,” kata Tjahjo saat dihubungi wartawan, Kamis (30/12).

Tjahjo menjelaskan, surat edaran tersebut memberikan dukungan kepada ASN untuk ikut serta mengikuti pelatihan komponen cadangan. Lewat surat itu, dia juga mendukung Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai ASN yang memenuhi syarat di instansinya untuk menjadi anggota komponen cadangan.

“ASN diharapkan untuk dapat terlibat dalam program komponen cadangan semata sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pertahanan negara. Dengan bergabungnya ASN ke dalam komponen cadangan, maka dapat memperkuat upaya pertahanan negara yang dilakukan oleh komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI),” ujarnya.

Surat edaran diteken Tjahjo pada 27 Desember 2021. Adapun ketentuan tentang komponen cadangan tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Komponen cadangan harus selalu siaga dan siap dikerahkan karena keadaan darurat militer atau perang.

Keberadaan komponen cadangan adalah mendukung komponen utama pertahanan negara, yakni TNI. Penggunaan komponen cadangan ini hanya pada saat dikerahkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Artinya, komponen cadangan memiliki masa aktif dan masa tidak aktif selama masa pengabdian. ● han



FOTO: ANT

SIDANG LANJUTAN AZIS SYAMSUDDIN

Terdakwa Azis Syamsuddin bersiap menjalani sidang lanjutan kasus suap kepada mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (30/12). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan tiga orang saksi yaitu mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa dan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahril secara daring dan Aliza Gunado.

Gus Yahya Bakal Rangkul Kubu KH Said Aqil dalam Kepengurusan NU yang Dipimpinnya

JAKARTA (IM) - Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan, setelah Mukhtar NU berakhir di internal NU sudah tak ada lagi friksi-friksi.

Gus Yahya menyebut bahwa friksi yang sempat terjadi kemarin hanya pergulatan kecil antarpeserta Mukhtar. Setelah Mukhtar selesai, semuanya sudah berangkuhan.

“Jadi kemarin kalau ada isu soal friksi, perpecahan, dan sebagainya itu sebetulnya kami sendiri di dalam ini tidak merasakan seperti itu. Ini antarteman. Hal ini suatu hal yang lazim dari mukhtar ke mukhtar ini,” ujarnya saat ditemui MNC Portal, Rabu (30/12).

Gus Yahya mengatakan, mukhtar yang berlangsung kemarin adalah mukhtar paling tenang jika dibandingkan mukhtar-mukhtar sebelumnya. Bahkan, mantan Juru Bicara Gus Dur itu menganggap, dari sisi kompetisinya juga tidak seberat mukhtar-mukhtar sebelumnya.

“Sedangkan di mukhtar-mukhtar yang lalu pun sesudah mukhtar ya kita gabung lagi, bareng lagi, bersama lagi sudah biasa di dalam NU,” kata Gus Yahya.

Sementara itu, terkait pembentukan Kabinet PBNU, Gus Yahya tak menampik jika nantinya kabinet yang akan disusunya tetap mengakomodasi pengurus lama atau kelompok yang berada di kubu KH Said Aqil Siradj.

“Maka sesudah (mukhtar) ini tentu pasti sekaligus pasti kita bicarakan bersama (rencana pembentukan kabinet baru),” jelas Gus Yahya kepada wartawan.

Gus Yahya menganggap, antara dirinya dengan KH Said saat ini semakin harmonis. Bahkan, ia menganggap KH Said sebagai guru sekaligus keluarganya. Sehingga, ia menyinggung kembali aksi cium pipi dan tangan KH Said yang biasa dilakukan dalam tradisi santri kepada gurunya.

“Iya beliau guru saya. Ada mukhtar atau tidak saya cium tangan gitu saja. Itu juga satu hal nalurih saja,” ujarnya.

Politik Praktis

Gus Yahya menegaskan NU akan mengambil jarak dengan politik praktis sejak keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Mukhtar NU. Di mana NU tidak lagi diperbolehkan jadi pihak di dalam kompetisi politik praktis mulai dari keputusan pada Mukhtar ke 26 NU

tahun 1979 di Semarang dan Mukhtar ke 27 tahun 1984 di Situbondo. Lalu disempurnakan dalam Mukhtar ke 28 NU tahun 1989 di Yogyakarta.

“Kita harus mengacu lagi kesana karena yang menjadi keputusan-keputusan Mukhtar itu menurut posisinya dari NU di tengah pergulatan kebangsaan,” ucap Gus Yahya.

Gus Yahya mengatakan, sebelumnya NU sempat menjadi partai politik (parpol) pada tahun 1945 hingga 1971. Namun sekarang, NU kembali menjadi perkumpulan yang mengambil jarak dari politik praktis dan tidak menjadi pihak dalam kompetisi perpolitikan di Indonesia.

“Kita ingin memposisikan NU sungguh-sungguh sebagai penyangga ketuhan bangsa. Bukan hanya ikut-ikutan bertempur melawan kelompok lain, tapi kita ingin supaya NU ini menjadi jembatan terhadap hal yang terhambat komunikasinya, itu posisi NU,” katanya menegaskan. ● han

TNI AL: Prajurit yang Terlibat Pengiriman Tenaga Kerja Ilegal akan Disanksi Tegas

JAKARTA (IM) - Pihak TNI Angkatan Laut (AL) bakal menerapkan sanksi tegas apabila prajuritnya terbukti terlibat dalam pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Kapal yang mengangkut PMI itu tenggelam di perairan Tanjung Baru, Johor dan mengakibatkan puluhan orang meninggal.

“Jika ada anggota TNI AL yang terlibat dalam insiden ini, maka akan ditindak tegas,” kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono, melalui keterangan tertulis, Kamis (30/12).

“Prinsip Bapak KSAL Laksamana TNI Yudo Margono sangat tegas, bagi anggota yang melakukan pelanggaran harus diberikan hukuman, untuk menumbulkan efek jera, dan pembelajaran bagi yang lain,” ujarnya.

Julius mengatakan, saat

ini TNI AL masih mendalami dugaan keterlibatan prajurit TNI AL itu. Dugaan itu awalnya disampaikan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Ia menduga ada keterlibatan anggota TNI AU dan TNI AL dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia. Dugaan ini didapatkan BP2MI berdasarkan hasil investigasi tim khusus terhadap peristiwa tenggelamnya kapal yang mengangkut PMI ilegal di perairan Johor, Malaysia beberapa waktu lalu.

Hasil investigasi, pengiriman PMI itu dilakukan secara terorganisasi. Kapal pengangkut PMI itu kemudian mengalami kecelakaan pada 15 Desember 2021 lalu sekitar pukul 05.00 WIB. Selain puluhan orang meninggal dunia, ada belasan orang yang selamat dan beberapa masih belum ditemukan. ● han

PT TELAGA MAS KALIMANTAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA	
Direksi perseroan terbatas PT TELAGA MAS KALIMANTAN, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengundang seluruh pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:	
Hari/Tanggal	Senin, 17-01-2022
Pukul	11:00 WIB
Tempat	Kantor Perseroan Telaga Mas Kalimantan Kebayoran Icon Office, Kebayoran Lama - Jakarta Selatan
Agenda :	
1.	Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus
2.	Persetujuan Penjualan Saham PT Pan Indo Resources, PT Mahabharata Dharma Ekatama, PT Mahabharata Eka Paksi
3.	Persetujuan Pemberian Kuasa kepada Direksi atau yang ditunjuk oleh Direksi untuk menghadap Notaris untuk mengaktakan hasil Rapat;
4.	Pembahasan Lain-lain
Catatan:	
* Para pemegang saham diharap hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai;	
Jakarta, 31 Desember 2021	
PT TELAGA MAS KALIMANTAN	

sme finance Indonesia	
LAPORAN PIUTANG HAPUS BUKU PERIODE 31 JULI 2021	
(dalam jutaan rupiah)	
Nama Debitur	Pokok Hutang
I MADE YUDIANA	24.000
Total Piutang Hapus Buku 31 Juli 2021	24.000
Jakarta, 31 Desember 2021	
PT SME FINANCE INDONESIA DIREKSI PERSEROAN	